
Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Ahmad Sulaeman Nagib Ridlwan¹, Suparto²

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: anagibridlwan@gmail.com^{*1}, Suparto@uinjkt.ac.id²

Article received: 07 April 2025, Review process: 22 April 2025

Article Accepted: 10 Juni 2025, Article published: 11 Juli 2025

ABSTRACT

Curriculum changes in Indonesia are a response to social dynamics and global challenges affecting the quality of national education. One of the recent reforms is the implementation of the Merdeka Curriculum, which is designed to allow flexible learning tailored to local contexts and student needs. This study aims to analyze the policy direction of the Merdeka Curriculum and its implementation strategies as an effort to improve the quality of education in Indonesia. The method used is a descriptive qualitative study through literature review from scholarly sources, policy documents, and relevant academic articles. The findings reveal that the Merdeka Curriculum emphasizes project-based learning, character strengthening through the Pancasila Student Profile, flexibility for schools, and the integration of digital technology. The main challenges in implementation include teacher readiness, infrastructure limitations, and disparities in education quality across regions. The implication of these findings highlights the need for consistent policy, teacher training support, and cross-sector collaboration to ensure equitable and sustainable implementation of the Merdeka Curriculum.

Keywords: Policy, Merdeka Curriculum, Challenges and Strategies

ABSTRAK

Perubahan kurikulum di Indonesia merupakan respons terhadap dinamika sosial dan tantangan global yang memengaruhi mutu pendidikan nasional. Salah satu reformasi terkini adalah penerapan Kurikulum Merdeka yang dirancang untuk memberikan keleluasaan pembelajaran sesuai konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan Kurikulum Merdeka dan strategi implementasinya sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur terhadap sumber-sumber ilmiah, dokumen kebijakan, serta artikel akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berbasis proyek, penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila, fleksibilitas bagi sekolah, serta pemanfaatan teknologi digital. Kendala utama dalam penerapan kurikulum ini meliputi kesiapan guru, keterbatasan infrastruktur, dan ketimpangan mutu pendidikan antarwilayah. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang konsisten, dukungan pelatihan, serta kolaborasi lintas sektor guna memastikan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka secara merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan, Kurikulum Merdeka, Tantangan dan Strategi

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan dari masa ke masa sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan nasional. Perubahan ini tercermin dalam penyempurnaan kurikulum, penguatan infrastruktur pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara konsisten meluncurkan berbagai kebijakan strategis untuk menjawab tantangan zaman, termasuk mengatasi ketimpangan mutu dan keterjangkauan layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu tonggak penting dalam reformasi pendidikan adalah diluncurkannya Program Sekolah Penggerak pada awal 2021 oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Program ini hadir sebagai transformasi budaya sekolah yang menekankan pembelajaran berorientasi pada peserta didik, bukan lagi sekadar pada aspek administratif. Fokus utamanya adalah mencetak lulusan dengan karakter profil pelajar Pancasila yang mampu beradaptasi dalam dunia yang terus berubah. Sekolah Penggerak menjadi pilot project yang membuka jalan bagi lahirnya kebijakan kurikulum baru yang lebih adaptif dan fleksibel.

Menindaklanjuti semangat transformasi tersebut, pemerintah kemudian merilis Kurikulum Merdeka pada tahun 2022 sebagai respons atas tantangan pasca pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya *learning loss*. Kurikulum ini dirancang agar lebih ringkas dan sederhana, namun tetap mampu menjawab kebutuhan pengembangan peserta didik secara menyeluruh. Pemerintah mendorong satuan pendidikan agar dapat lebih mandiri dalam merancang proses pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal dan potensi individu siswa, serta selaras dengan tantangan abad ke-21.

Kurikulum Merdeka mengedepankan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa serta menekankan pentingnya penguatan keterampilan esensial seperti berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikatif. Dengan pendekatan yang menyesuaikan kebutuhan lokal dan minat siswa, kurikulum ini memberikan ruang bagi guru dan sekolah untuk berinovasi dalam menyusun metode dan materi ajar. Pendekatan intrakurikuler yang bervariasi juga menjadi ciri khas dari Kurikulum Merdeka dalam mendorong pencapaian kompetensi yang lebih mendalam.

Namun demikian, implementasi Kurikulum Merdeka bukan tanpa tantangan. Kesiapan sumber daya manusia, terutama guru, masih menjadi persoalan utama, mengingat tidak semua guru telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang memadai. Di samping itu, kesenjangan infrastruktur pendidikan di berbagai daerah juga turut menghambat pemerataan pelaksanaan kurikulum ini. Ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah menjadi salah satu isu krusial yang harus dihadapi pemerintah secara serius dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan Kurikulum Merdeka sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan serta strategi yang dapat diambil untuk mendukung keberhasilannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur atau studi Pustaka (Iwan Hermawan, 2019), studi Pustaka adalah usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan atau berkaitan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis, disertasi, ensklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik. Sumber data berasal dari data sekunder, yaitu berbagai publikasi ilmiah yang terpercaya, termasuk termasuk jurnal-jurnal akademik yang relevan dengan analisis kebijakan kurikulum merdeka belajar, upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan melalui eksplorasi sistematis serta kajian isi terhadap literatur yang tersedia, baik dalam format digital maupun cetak. Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis secara deksriptif untuk mengidentifikasi isu-isu pokok, merumuskan konsep-konsep fundamental, serta menelaah analisis kebijakan kurikulum merdeka belajar, upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan analisis kebijakan kurikulum merdeka belajar, upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, peneliti paparkan sebagai berikut:

Definisi dan Konsep Kurikulum Merdeka

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan potensi daerah dan peserta didik. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 56 Tahun 2022 adalah Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran. Keputusan ini memberikan panduan bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai kondisi masing-masing, termasuk pilihan untuk menerapkan Kurikulum 2013 utuh, Kurikulum 2013 yang disederhanakan, atau Kurikulum Merdeka secara keseluruhan. Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang mengatur tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Peraturan ini menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka, sistem pendidikan nasional telah mengalami berbagai perubahan kurikulum sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika sosial, politik, dan kebutuhan pendidikan nasional. Setidaknya terdapat sebelas perubahan kurikulum utama yang menunjukkan perjalanan panjang reformasi pendidikan. Kurikulum pertama yang muncul adalah Rencana Pelajaran 1947, yang menggunakan istilah Belanda "leer plan" dan menandai peralihan dari

orientasi kolonial ke arah pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Pada tahun 1952, kurikulum mengalami penyempurnaan menjadi Rencana Pelajaran Terurai, yang memberikan rincian lebih pada setiap mata pelajaran. Selanjutnya, pada tahun 1964, pemerintah memperkenalkan Rencana Pendidikan yang menekankan program Pancawardhana – pengembangan moral, intelektual, emosional/kreatif, individual, dan fisik. Kurikulum 1968 hadir menggantikan kurikulum sebelumnya dengan semangat politik Orde Baru, menekankan pembentukan warga negara Pancasila yang sehat dan religius. Pada masa pembangunan nasional, lahirlah Kurikulum 1975 yang disusun untuk mendukung program Pelita dan Repelita. Reformasi berlanjut dengan Kurikulum 1984 yang mulai berfokus pada siswa melalui pendekatan Pembelajaran Aktif Siswa (SAL) atau Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA).

Perubahan selanjutnya tampak dalam Kurikulum 1994 yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan memperkenalkan sistem catur wulan. Memasuki era reformasi, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 diperkenalkan, dengan fokus pada identifikasi dan pengukuran kompetensi peserta didik. Setelahnya, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 memberikan otonomi kepada guru untuk merancang kurikulum sesuai kebutuhan dan kondisi lokal. Kurikulum 2013 hadir dengan pendekatan ilmiah yang menekankan keaktifan siswa dalam mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan hasil belajar mereka. Terakhir, Kurikulum Merdeka yang diluncurkan secara resmi oleh Kemendikbudristek pada tahun 2022 menjadi puncak dari rangkaian evolusi kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini menawarkan pembelajaran yang lebih beragam dan fleksibel melalui pendekatan intrakurikuler, mendorong kemandirian sekolah dalam menyusun pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Penekanan pada pembentukan karakter, penguatan profil pelajar Pancasila, dan penggunaan teknologi menjadikan Kurikulum Merdeka sebagai tonggak penting dalam arah baru pendidikan nasional.

Kurikulum Merdeka adalah sebuah konsep dalam dunia pendidikan di Indonesia yang menekankan pada kemandirian sekolah dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal mereka. Konsep ini menempatkan guru dan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan dalam menentukan apa yang akan diajarkan kepada siswa, bagaimana itu diajarkan, dan bagaimana mereka akan menilai kemajuan siswa. Kurikulum Merdeka merupakan salah satu alat bantu utama untuk melakukan transformasi pendidikan dan mewujudkan sekolah yang dicita-citakan, dan kurikulum ini memudahkan guru dan kepala sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran (Kemdikbud, 2024). Kurikulum Merdeka menawarkan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana kontennya diatur secara optimal untuk memberikan waktu yang cukup bagi peserta didik dalam mendalami konsep dan memperkuat kompetensi mereka. guru diberikan kebebasan untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. (Kemdikbud RI, 2022)

Kurikulum Merdeka yang bersifat fleksibel memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan pendidik untuk mengadaptasi serta memperkaya materi pelajaran, menyesuaikan visi misi lembaga, mengintegrasikan budaya serta kearifan lokal, dan menyelaraskan proses pembelajaran dengan karakteristik peserta didik (Tim Penyusun, 2024). Kurikulum ini memperkenalkan pendekatan intrakurikuler yang lebih beragam sebagai bentuk transformasi signifikan dalam pendidikan Indonesia, serta menekankan pentingnya pembelajaran berbasis konten esensial guna memastikan pemahaman mendalam siswa. Selain itu, Kurikulum Merdeka dirancang untuk mengembangkan kompetensi siswa secara holistik, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik, yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Kurikulum ini juga memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan dan guru untuk menentukan pendekatan pembelajaran sesuai konteks lokal masing-masing. Salah satu fokus utama adalah pencapaian profil pelajar Pancasila yang mencakup enam dimensi utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pendekatan pengajaran juga disesuaikan dengan tema-tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, sambil tetap memberi ruang kepada guru untuk berkreasi dan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan di lapangan (Musyarrafah Sulaiman Kurdi, 2024)

Tujuan utama pembentukan Kurikulum Merdeka adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, relevan, sederhana, inklusif, dan adaptif bagi siswa Indonesia, dengan memberikan ruang pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik serta mampu merespons dinamika lingkungan dan perubahan zaman (Musyarrafah Sulaiman Kurdi, 2024). Kurikulum ini dibangun di atas lima prinsip utama, yakni: pertama, prinsip relevansi, yang menuntut adanya keterkaitan internal antara komponen kurikulum seperti tujuan, bahan ajar, strategi, organisasi, dan evaluasi, serta relevansi eksternal terhadap sains dan teknologi, potensi siswa, dan kebutuhan masyarakat; kedua, prinsip fleksibilitas, yang memungkinkan kurikulum diadaptasi berdasarkan situasi, kondisi, dan latar belakang peserta didik; ketiga, prinsip kontinuitas, yang memastikan adanya kesinambungan antar jenjang pendidikan serta antara dunia pendidikan dan dunia kerja; keempat, prinsip efisiensi, yang menekankan pentingnya perencanaan pembelajaran yang optimal untuk mencapai hasil maksimal; dan kelima, prinsip efektivitas, yang mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran dapat dicapai secara konkret dalam pelaksanaan di lapangan.

Sedangkan prinsip khusus, sebagaimana dikemukakan oleh Sukmadinata mencakup lima hal, yakni; prinsip penentuan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar, pemilihan media dan alat pengajaran, serta berkenaan dengan penilaian.

Tantangan dan Strategi Implementasi Pemerintah Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka

Salah satu tantangan terbesar adalah kesiapan sumber daya manusia, khususnya guru. Tidak semua guru telah mendapatkan pelatihan yang memadai untuk memahami dan menerapkan Kurikulum Merdeka. Perubahan dari pendekatan pembelajaran konvensional ke pendekatan yang lebih fleksibel membutuhkan waktu dan adaptasi. Selain itu, tantangan lain adalah ketersediaan infrastruktur. Tidak semua sekolah, terutama di daerah terpencil, memiliki akses yang cukup terhadap fasilitas pendukung seperti teknologi, bahan ajar, dan koneksi internet. Padahal, salah satu komponen penting Kurikulum Merdeka adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ketimpangan kualitas pendidikan juga menjadi perhatian. Sekolah-sekolah di kota besar cenderung lebih siap mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dibandingkan sekolah di pedesaan atau wilayah tertinggal. Hal ini berpotensi memperbesar kesenjangan pendidikan di Indonesia.

Strategi pemerintah dalam menerapkan Kurikulum Merdeka mencakup beberapa langkah penting yang saling mendukung demi tercapainya transformasi pendidikan yang holistik. Pertama, melalui pelatihan dan pendampingan guru secara intensif, tidak hanya dari sisi teknis tetapi juga dalam aspek pemahaman filosofis agar para pendidik mampu mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara kreatif dan kontekstual. Kedua, penguatan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dilakukan melalui penyediaan sarana teknologi, bahan ajar, serta fasilitas belajar yang memadai sebagai fondasi pelaksanaan kurikulum baru. Ketiga, pemerintah mendorong kolaborasi antara sekolah, komunitas lokal, dan industri guna mengembangkan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) yang relevan dengan dunia nyata, sehingga siswa dapat menghubungkan teori dengan praktik secara langsung. Keempat, strategi ini dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan agar setiap kendala yang muncul dalam implementasi kurikulum dapat diidentifikasi lebih awal dan diselesaikan secara kolaboratif, sehingga pelaksanaan Kurikulum Merdeka dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

Peluang Peningkatan Mutu Pendidikan

Kurikulum Merdeka memberikan peluang besar bagi terciptanya pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual, di mana guru dan siswa dapat terlibat dalam proses belajar yang relevan dengan kehidupan nyata. Pendekatan berbasis proyek (*project-based learning*) memungkinkan siswa memecahkan masalah secara kolaboratif dan kreatif, sehingga mendekatkan materi pembelajaran dengan realitas sosial yang mereka hadapi. Selain itu, kurikulum ini memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan lokal serta potensi peserta didik, yang turut mendorong pengembangan kearifan lokal dan pendidikan berbasis budaya. Guru pun memiliki kebebasan untuk berinovasi dalam metode

pembelajaran yang digunakan, sehingga menciptakan suasana belajar yang dinamis dan sesuai dengan karakteristik siswa.

Lebih jauh, Kurikulum Merdeka juga menekankan pada penguatan karakter dan soft skills melalui implementasi nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila yang mencakup aspek keimanan, keberagaman, kemandirian, nalar kritis, gotong royong, dan kreativitas. Nilai-nilai ini penting sebagai bekal siswa dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Kurikulum ini juga memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung pembelajaran, dengan menyediakan platform seperti *Merdeka Mengajar* yang berisi materi ajar, pelatihan guru, serta forum berbagi praktik baik antar pendidik. Terakhir, Kurikulum Merdeka mendorong pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), yang memberi kewenangan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sendiri berdasarkan karakteristik peserta didik dan lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Hal ini memperkuat otonomi sekolah serta mendorong manajemen pendidikan yang lebih kreatif dan kontekstual.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka merupakan upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui pendekatan yang fleksibel, relevan, dan berpusat pada siswa. Kurikulum ini memberi keleluasaan bagi sekolah untuk menyusun pembelajaran sesuai konteks lokal dan kebutuhan peserta didik, dengan menekankan pada pengembangan potensi individu serta keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Meskipun menghadapi tantangan seperti kesiapan guru, keterbatasan infrastruktur, dan ketimpangan kualitas pendidikan, pemerintah telah merancang berbagai strategi implementasi, termasuk pelatihan guru, penguatan infrastruktur, kolaborasi lintas sektor, serta monitoring berkelanjutan. Jika diterapkan secara konsisten, Kurikulum Merdeka berpeluang menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual, memperkuat karakter serta soft skills siswa, mendorong pemanfaatan teknologi digital, dan mengembangkan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang adaptif.

DAFTAR RUJUKAN

- Awalludin, et.al. (2024). Prinsip dan Faktor Yang Mempengaruhi Kurikulum Merdeka. *jurnal Jurnal Yudistira: Publikasi Riset Ilmu Pendidikan dan Bahasa*, 121.
- Dini, F, et.al. (2023). Perkembangan Kurikulum Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. *Al-Idaroh Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 198.
- Febriana, N. (2024). Tantangan dan Peluang Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Akuntansi di SMK Markus 1 Medan. *jurnal Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 23.
- <https://mtsn8sleman.sch.id/blog/implementasi-kurikulum-merdeka-peluang-dan-tantangan/>

-
- <https://s3mp.fip.unesa.ac.id/post/tantangan-dan-strategi-implementasi-kurikulum-merdeka>
- Iwan, H. (2019) *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Mixed methode*. Kuningan: Hidayatul Qur'an, 18.
- Kemdikbud RI. *Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka (16 Februari 2022)*, 9. Kemdikbud. *Merdeka Belajar. Paparan Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran (27 Maret 2024)*, 4. Lihat juga Syafi'i, Fahrhan Firdaus. "Merdeka belajar: sekolah penggerak." *In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*. 2022.
- Musyarrifah S, K. (2024). *Memahami Prinsip-Prinsip Kurikulum Merdeka: Teori Dan Aplikasi Dalam Pembelajaran*. Hulu Sungai Utara: PT. Literatus Digitus Indonesia, 11-22.
- Nadziroh, F et.al. (2023). *Pengembangan Sistem Pembelajaran Nasional*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 16.
- S Aslam., Zahra, S. (2020). *The Impact of the Independent Curriculum on Students Creativity*, *Journal of Education and Practice*, 56-63.
- Sunarni. Hari, K. (2023) *Persepsi Guru Terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar*. *Journal on Education*, 1614.
- Tim Penyusun. *Kajian Akademik Kurikulum Merdeka Maret 2024*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024), 20.